PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI PADA SIDANG TAHUNAN MPR-RI DAN SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD-RI
JUMAT, 15 AGUSTUS 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT.
YTH. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA, PIMPINAN OJK, PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DI SUMATERA BARAT.
YTH. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. PIMPINAN BANK NAGARI, PIMPINAN BUMN, PIMPINAN BUMD.
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan agenda Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada

Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2025.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad.**

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Gubernur, Asisten, Kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar, BUMN, BUMD, MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri, Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2025, dengan Agenda "Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan

DPD-RI Tahun 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda ketatanegaraan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Menteri Sekreatris Negara Nomor : B-25/M/S/TU.00.03/08/2025, tanggal 12 Agustus 2025, perihal Pedoman Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, dalam rangka Peringatan HUT RI ke 80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, pada tanggal 15 Agustus 2025, Presiden RI akan menyampaikan Pidatonya dihadapan sidang tahunan MPR-RI dan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI tahun 2025, dalam rangka menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka meperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia dan masyarakat Indonesia,

kedua agenda ketatanegaraan tersebut, perlu kita ikuti dan simak bersama.

Sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh Sekretaris Negara, pada pukul 09.00 Wib pagi ini, kita akan mendengarkan Pidato Presiden dihadapan Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka Penyampaaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Sidang DPR-RI dan DPD-RI dalam rangka penyampaian Pidato Kenegaraan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025, dan pada pukul 14.30 siang nanti, kita akan mendengarkan pula pidato Presiden RI dihadapan Sidang DPR-RI pada pembukaan Masa Persidangan Pertama tahun 2025-2026.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan rangkaian sejarah perjuangan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya menjadi Negara yang merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan dan berdiri diatas kakinya sendiri. Kemerdekaan tersebut tentu tidak diperoleh dengan mudah, tetapi penuh dengan perjuangan

dan pengorbanan, dan jangan sampai kita melupakan jasa - jasa para suhada dan pahlawan bangsa yang telah berjuang dengan tetesan darah untuk kemerdekaan bangsa ini.

Kemerdekaan merupakan pintu gerbang dan titik awal untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita ini juga mencakup tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kemerdekaan Indonesia merupakan, bebas dari penjajahan dan penindasan bangsa lain, serta memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan nasib sendiri. Untuk itu kita harus terus berjuang dalam mengisi kemerdekaan untuk kejayaan Negara Indonesia, dengan berinnovasi dan berkarya agar Indonesia menjadi Negara yang maju sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding father, Bung Karno dan Bung Hatta.

Diusia yang ke-80, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa maju, berdaulat, adil dan makmur yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia. Saat ini kita baru masuk dalam kelompok Negara berpendapatan menengah atas upper middle income country (UMIC) dengan Gross National Incoume (GNI) perkapita sebesar US$ 4.960,3 masih banyak yang harus kita kerjakan untuk dapat mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah merampungkan pembahasan RPJMD 2025-2029, tentu semangat kemerdekaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian khusus diantaranya, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan, Urban-Rural Linkage dan Pembangunan Desa, Industri dan Perdaganggan sebagai Lokomotif Baru, Infrastruktur dan Ketangguhan Bencana, Kelestarian

Lingkungan dan Perubahan Iklim, Pelestarian Adat dan Budaya Lokal, Penguatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Good and Clean Governance.

Disamping itu Pemerintah juga menggulirkan program **Koperasi Desa Merah Putih**, sebagai instrumen baru dalam transformasi pembiayaan mikro nasional. Dengan dana yang lebih besar dibandingkan KUR perbankan, model ini akan menciptakan tatanan baru dalam perekonomian desa.

Di tengah karakter Sumatera Barat yang kuat dengan nagari-nagarinya, kita menyambut baik inisiatif ini. Namun kita juga harus cermat. Tanpa tata kelola koperasi yang baik, justru masyarakat dapat terjebak dalam sistem yang tidak produktif dan pada akhirnya kembali kepada ketergantungan pada perbankan konvensional.

Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat untuk menyiapkan langkah adaptif: memperkuat kelembagaan koperasi, mempercepat transformasi digital UMKM, serta meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola dana desa dan koperasi.

Jika kita mampu menyesuaikan diri dengan baik, koperasi desa akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkeadilan.

Sdr. Gubernur dan Undangan Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 159 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR-RI, MPR-RI melakukan sidang tahunan dalam rangka penyampaian laporan kinerja Lembaga-Lembaga Negara. Pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2025 ini, Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga Negara sebagai wujud akuntabilitas dan transparasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Laporan terhadap kinerja Lembaga-lembaga Negara tersebut, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan mandatnya kepada Lembaga Negara tersebut. Lembaga-lembaga Negara yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Negara yang dibiayai oleh dana masyarakat melalui APBN, tentu harus menjadi motor dan bekerja untuk kepentingan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Lembaga- lembaga Negara tersebut, perlu menyampaikan laporan atas kinerjanya kepada Masyarakat melalui Lembaga MRI-RI yang merupakan respresentasi masyarakat Indonesia.

Rapat Paripurna dan Undang Yang Kami Hormati;

Demikianlah beberapa pengantar yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka Rapat Paripurna ini. Selanjutnya, marilah kita bergabung dengan Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.

.....

Mendengarkan Penyampaian Laporan Kinerja Negara dan Pidato Presiden RI Dalam rangka HUT RI ke-80 Tahun 2025.

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Kita sama-sama telah mendengarkan laporan atas kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI dan pesan-pesan kemerdekaan yang disampaikan oleh Presiden pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI. Dari

laporan kinerja Lembaga-lembaga Negara, kita sudah dapat mengatahui sampai sejauh mana hasil yang dicapai dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga- lembaga Negara serta dampak yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan kinerja Lembaga negara tersebut, tentu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh masyarakat terhadap akuntabilitas, efektivitas dan profesionalitas Lembaga Negara tersebut.

Sedangkan dari Pidato Kenegaraan dalam rangka Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 80 Tahun 2025, banyak pesan-pesan kemerdekaan yang bisa kita ambil, sebagai bekal dan penyemangat bagi kita untuk terus berkarya dan membangun negeri dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan tema HUT Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025 yaitu " Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju", maka marilah kita tingkatkan kebersamaan, kekompakan dan terus berjuang untuk menjadikan negara dan daerah kita maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Kita bangun kebersamaan dan tingkatkan komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini dan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan tersebut, kita lanjutkan pembangunan daerah yang telah dan sedang dikerjakan, untuk menjadikan Sumatera Barat lebih maju dan lebih Sejahtera dan maju bersama sebagai daerah yang beradab dan berbudaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diakhir sambutan ini, kami menyampaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 **"Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju"**

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan laporan kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Presiden Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 80 Tahun 2025 pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada siang hari

ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami mengingatkan kembali kepada kita semua, bahwa pukul 14.00 wib nanti, kita kembali akan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang APBN Tahun 2026. Untuk itu, kami harapkan kehadiran Bapak/Ibu sekalian pada Rapat Paripurna tersebut, oleh karena sangat penting untuk kita dengarkan bersama seperti apa arah kebijakan pembangunan dan anggaran Pemerintah pada Tahun 2026 nanti.

Akhirnya dengan mengucapkan "**Alhamdulillahirabbilalimin** " Rapat Paripurna kita pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketokan palu 3 x)

Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wass.wr.wb

PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS
RUU APBN TAHUN ANGGARAN 2026
JUMAT, 15 AGUSTUS 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA, PIMPINAN OJK, PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DI SUMATERA BARAT.
YTH. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. PIMPINAN BANK NAGARI, PIMPINAN BUMN, PIMPINAN BUMD, KETUA MUI, KETUA LKAAM, BUNDO KANDUANG, LSM.
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita dapat hadir kembali bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan agenda Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam

Rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad.**

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri, Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada siang Hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2025, dengan Agenda **"Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026**, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintah, mengajukan Rancangan UU tentang APBN disertai Nota Keuangan kepada DPR pada bulan Agustus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara, APBN merupakan rencana anggaran tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional.

Sebagai rencana anggaran pada tahun 2026, maka Pidato Presiden dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2026, perlu diikuti dan didengarkan oleh semua pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Disamping untuk mengetahui arah kebijakan pembangunan dan arah kebijakan fiskal nasional pada

tahun 2026, terdapat informasi penting lainnya yang perlu kita ketahui dan pahami dari penyampaian RUU APBD Tahun 2026 ini, yaitu terkait dengan program prioritas, kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Transfer ke Daerah (TKD) serta seberapa banyak program pusat yang akan dilaksanakan di daerah, baik melalui dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Terkait dengan TKD, kita juga perlu mengetahui, apakah masih ada kebijakan DAU Peruntukan seperti tahun 2025 yang cukup menyulitkan daerah dalam berinovasi terhadap pengunaan DAU.

Arah dan kebijakan anggaran Pemerintah Pusat pada tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden, akan memiliki korelasi yang kuat dengan arah kebijakan anggaran dan pembangunan daerah yang saat ini dalam proses penyusunannya. Apalagi, bagi Provinsi Sumatera Barat yang kemampuan fiskalnya sangat rendah, akan sangat tergantung dari dukungan APBN untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

RUU APBN Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada RKP Tahun 2026 dengan Tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** tema ini mencerminkan semangat kemandirian bangsa dan tekad untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Tema ini sekaligus menjadi arah strategis bagi kita dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional, sehingga Sumatera Barat dapat turut ambil bagian dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkeadilan social.

Tema ini juga mencerminkan 2 (dua) klaster prioritas pembangunan nasional tahun 2026. ***Pertama,*** kedaulatan pangan dan energi. Pemerintah pusat menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui optimalisasi peran Bulog dan pembangunan lumbung pangan. Dalam konteks Sumatera Barat, yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar, ini menjadi peluang sekaligus

tantangan untuk memperkuat peran daerah dalam menjaga distribusi dan ketersediaan pangan.

Begitu juga dalam sektor energi, dengan peningkatan bauran etanol, biodiesel, dan energi baru terbarukan, kita didorong untuk mengembangkan potensi lokal energi bersih secara lebih serius. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi, inovasi, serta kolaborasi dengan sektor swasta agar energi berkelanjutan dapat terwujud secara nyata.

Kedua, ekonomi produktif dan inklusif, dengan fokus pada pembangunan manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggul, digitalisasi pendidikan, serta pemeriksaan kesehatan dan percepatan pembangunan rumah sakit daerah, semuanya adalah langkah nyata untuk memperkuat SDM Indonesia yang unggul dan sehat.

DPRD Provinsi Sumatera Barat siap mendukung program-program tersebut, dengan memastikan bahwa anggaran daerah selaras dan berpihak pada kebutuhan rakyat, terutama kelompok rentan dan masyarakat miskin.

Selain itu, fokus pemerintah dalam hal deregulasi, pertahanan semesta, hilirisasi, pengentasan kemiskinan melalui koperasi desa Merah Putih, serta pembangunan 3 juta rumah adalah bagian dari strategi untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memfasilitasi implementasi program-program tersebut agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Sumatera Barat.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Demikianlah beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar rapat paripurna ini. Selanjutnya marilah kita bergabung dengan Rapat Paripurna DPR-RI untuk mendengarkan Pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun 2026.

.....

Bergabung Mendengarkan Pidato Presiden RI

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah mendengar dan menyimak Pidato Presiden dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang APBN Tahun 2026. Dalam keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden tersebut, kita sudah dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan dan fiskal nasional tahun 2026.

Terdapat bebarapa hal penting yang perlu kita sinergiskan nanti dengan kebijakan pembangunan dan fiskal daerah yang akan kita tuangkan dalam Ranperda APBD Tahun 2026, yaitu:

1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2026 ditertapkan sebesar 5.2 % - 5.8 %. Sedangkan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi yang kita sepakati dalam RPJMD 2025-2029, dimana pada tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi sumatera barat sebesar 5,7%, dan kondisi Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,8%, yang sifatnya imperative. tentu ini menjadi tantangan yang berat bagi

pemerintah daerah bagaimana bisa memacu dan meningkatkan perekonomian di daerah.

2. Memperhatikan prospek perekonomi global dan nasional pada tahun 2025 yang diliputi kondisi yang tidak menentu, maka perlu ke hati-hatian dalam penyusunan arah kebijakan anggaran pada tahun 2026 dan mawas diri terhadap kondisi yang akan dihadapi. Alokasi anggaran betul-betul diprirotaskan untuk kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperhatikan kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam mengejar program, kegiatan dan anggaran Kementerian yang urusannya telah diserahkan kepada daerah.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang APBN Tahun 2026, maka

berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada sore hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat kata-kata yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan "**Alhamdulillahirabbilalimin** " Rapat Paripurna kita pada siang hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketokan palu 3 x)

Terima kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh